

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada saat ini Pemerintah Indonesia sedang menghadapi permasalahan yang cukup serius dalam menghadapi pelayanan kesehatan yang meningkat tajam dari waktu ke waktu. Berdasarkan Indonesian Policy Health yang diterbitkan oleh World Bank menyebutkan bahwa pembiayaan kesehatan di Indonesia lebih didominasi oleh keuangan pribadi yang disebabkan oleh minimnya fasilitas publik kesehatan yang dibangun oleh pemerintah sehingga banyak orang Indonesia yang lebih memilih fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pihak swasta untuk menjalani perawatan kesehatan. Pada sebagian besar wilayah Indonesia, sektor swasta mendominasi penyediaan fasilitas kesehatan dan saat ini terhitung lebih dari dua pertiga fasilitas ambulans yang ada disediakan oleh pihak swasta dan lebih dari setengah rumah sakit yang tersedia merupakan rumah sakit swasta. Sekitar 30-50% segala bentuk pelayanan kesehatan diberikan oleh pihak swasta (satu dekade yang lalu hanya sekitar 10 persen).

Mobilisasi sumber pembiayaan kesehatan dari masyarakat yang masih terbatas tersebut bersifat perorangan (*Out of pocket*), sehingga biaya pelayanan kesehatan sangat sulit diperhitungkan. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya patokan yang jelas dalam penentuan besaran jasa medis, sehingga besar jasa kesehatan yang diterima oleh seorang petugas medis akan sangat

bervariasi pada organisasi kesehatan yang bervariasi pula. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk melakukan standardisasi jasa medis, namun karena penetapannya merupakan wewenang dari masing-masing pemerintah daerah, menyebabkan standardisasi belum menemukan titik temunya.

Jasa akan mempunyai dampak terhadap kinerja dari dokter spesialis. Hasil penelitian Utarini, dkk (2006) yang meneliti tentang persepsi dan pengaruh sistem pembagian jasa pelayanan terhadap kinerja pada karyawan Rumah Sakit Jiwa Madani, temuannya menunjukkan bahwa sistem pemberian insentif terhadap tenaga medis dapat berakibat terhadap kepuasan kerja dari seorang dokter. Pada penelitian tersebut, berdasarkan perhitungan indeks insentif yang berlaku di RSJ Madani dimungkinkan insentif yang akan diterima oleh seorang pegawai struktural akan mendapatkan jasa lebih besar dari yang diterima oleh dokter dan paramedis yang hanya berperan sebagai tenaga fungsional di rumah sakit. Padahal di beberapa rumah sakit tenaga dokter mendapatkan jasa pelayanan lebih besar. Dalam perspektif yang berkembang, peran dokter sangat menentukan karena pasien datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan dokter, di samping pelayanan tenaga kesehatan lainnya. Berdasarkan sistem tersebut, beberapa dokter pada RSJ Madani melakukan penolakan terhadap gaji yang diterima.

Selain faktor ketidakpuasan dokter terhadap nilai dari jasa medis yang diterima, penolakan tersebut menurut Utarini, dkk (2006) juga disebabkan oleh tiga hal lain, yaitu waktu pembayaran jasa pelayanan tidak jelas, tidak adanya

transparansi dalam mekanisme pembagian dan penetapan indeks, dan ketidakadilan dan ketidaktahuan akan sistem pembagian karena dokter spesialis belum terlibat dalam perumusan sistem pembagian jasa pelayanan yang telah digunakan sebelumnya.

Hal tersebut dapat memberi gambaran bahwa kebanyakan dari dokter umum/spesialis tidak mengetahui besarnya jasa medis yang diterima pada suatu rumah sakit. Beberapa pihak menganggap bahwa kejelasan formula pemberian jasa medis termasuk hak pasien yang harus dipenuhi oleh dokter dan rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan.

Pada RS PKU Muhammadiyah Nanggulan besarnya tarif jasa medis ditetapkan dengan jasa PERDA. PERDA yang terbaru adalah PERDA No.1 Tahun 2005 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dan Pengelolaan Hasil Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Wates. Tujuan dari adanya perda tersebut agar jasa yang diterimakan kepada dokter mendekati harapan. Pada kenyataannya selalu ada permasalahan mengenai besar jasa yang diterima, hal ini terjadi karena setiap dokter mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Perhitungan jasa medik dokter umum/spesialis pada RS PKU Muhammadiyah Nanggulan dilakukan berdasarkan pada prestasi kerja yang bersangkutan sehingga dengan sendirinya apabila tindakan yang dilakukan cukup banyak maka jasa yang akan diterima juga besar. Sebagai gambaran variasi besarnya jasa yang diterima oleh dokter spesialis di RS PKU Muhammadiyah Nanggulan dapat dilihat seperti pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Besaran Jasa yang Diterima Dokter Umum dan Spesialis di RS  
PKU Muhammadiyah Nanggulan Tahun 2012-2014 (dalam Rupiah)

<b>Dokter</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Umum	19,614,673	24,000,892	26,458,243
Spesialis Anak	17.946.450	22,104,925	35,149,925
Spesialis Obstetri & Ginekologi	93.565.975	104,316,100	113,196,700
Spesialis Penyakit Dalam	40.093.325	45,826,025	46,393,650
Spesialis Syaraf	11.986.950	10,634,825	10,027,450

*Sumber: Data keuangan RS PKU Muhammadiyah Nanggulan, 2014*

Berdasarkan rata-rata penerimaan jasa medis dokter umum dan spesialis di RS PKU Muhammadiyah Nanggulan, dapat diketahui bahwa dokter spesialis kandungan merupakan dokter yang paling tinggi penerimaan jasa medisnya, sedangkan yang paling rendah adalah jasa medis dokter spesialis syaraf. Hal tersebut menunjukkan perbedaan jasa medis yang cukup signifikan diantara dokter umum/spesialis. Perbedaan jasa medis tersebut dipengaruhi oleh prestasi dokter dalam menangani banyaknya pasien yang melakukan perawatan kesehatan.

Jasa medis mempunyai dua sisi yang saling bertentangan, dimana jasa medis yang besar akan menjadi beban pasien sehingga tarip yang ditetapkan akan menjadi lebih besar. Namun di sisi lain, jasa medis yang terlalu kecil justru akan menurunkan kinerja dari para pelayan jasa medis, khususnya seorang dokter spesialis. Penetapan jasa medis dapat juga dikatakan sebagai suatu sistem kompensasi dan insentif yang akan menambah kinerja karyawan. Seorang dokter pasti akan senang jika mempunyai jasa medis yang besar dimana ia akan mendapat pendapatan yang lebih hanya dengan melayani pasien dengan jumlah yang sedikit. Namun tidak semua dokter punya persepsi yang sama dengan besarnya jasa medis tersebut.

Rumah Sakit PKU Nanggulan hanya memiliki empat dokter spesialis (spesialis anak, dalam, kandungan, dan syaraf). Keterbatasan jumlah dokter spesialis tersebut dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu keterbatasan finansial dan kurangnya minat dari dokter spesialis untuk melakukan praktek kerja di RS PKU Muhammadiyah Nanggulan. Namun untuk alasan keterbatasan finansial dari pihak rumah sakit dapat ditepis dengan data kunjungan pasien yang melakukan perawatan kesehatan baik rawat inap maupun rawat jalan, dimana dari tahun 2013 sampai tahun 2014 dan diperkirakan sampai pada tahun 2015 akan terus meningkat. Berikut data kunjungan pasien tahun 2013 dan 2014.

Tabel 1.2 Data Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap  
RS PKU Muhammadiyah Nanggulan Tahun 2013-2014

NO	BULAN	RAWAT JALAN		RAWAT INAP		JUMLAH	
		2013	2014	2013	2014	2013	2014
1	Januari	1483	1792	110	109	1593	1901
2	Februari	1429	1638	115	113	1544	1751
3	Maret	1425	1666	126	105	1551	1771
4	April	1367	1560	102	99	1469	1659
5	Mei	1371	1745	96	97	1467	1842
6	Juni	1281	1692	110	91	1391	1783
7	Juli	1470	1582	110	85	1580	1667
8	Agustus	1819	1935	110	121	1929	2056
9	September	1466	1613	84	68	1550	1681
10	Oktober	1362	1661	85	101	1447	1762
11	November	1445	1406	107	73	1552	1479
12	Desember	1507	1547	90	91	1597	1638
	<b>Total</b>	17425	19837	1245	1153	18670	20990

Sumber: Profil RS PKU Muhammadiyah Nanggulan, 2014

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa penyebab terbatasnya jumlah dokter spesialis di RS PKU Muhammadiyah Nanggulan bukan disebabkan oleh alasan finansial dari rumah sakit yang setiap tahunnya mengalami kenaikan kunjungan pasien, namun lebih disebabkan oleh

kurangnya minat dokter spesialis untuk praktek kerja di RS PKU Muhammadiyah Nanggulan. Hal tersebut dimungkinkan berhubungan dengan adanya UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Kesehatan Kesehatan, yang menyebutkan bahwa seorang dokter spesialis dibatasi tempat prakteknya maksimal hanya 3 tempat. Hal ini tentu saja menjadi pertimbangan yang matang bagi dokter spesialis untuk secara cermat menentukan rumah sakit mana yang paling sesuai untuk dijadikan tempat praktek. Terdapat beberapa pertimbangan seorang dokter dalam menentukan tempat praktek, salah satu diantaranya yang merupakan faktor penarik yang paling kuat adalah besarnya jasa medis yang akan diterima dari rumah sakit tersebut.

Besar kecilnya jasa medis bagi dokter tentunya akan sangat relatif, yang tergantung dari harapan, kebutuhan hidup, usia, dan jenis kelamin. Kebutuhan hidup dan keinginan seorang dokter akan berbeda satu dengan yang lainnya dengan melihat pola hidup, jumlah anak, dan banyak faktor lain yang menentukan. Dokter yang muda bisa saja mempunyai kebutuhan hidup yang lebih sedikit daripada dokter yang senior. Seorang dokter wanita pun juga akan mempunyai tuntutan kebutuhan hidup yang lebih sedikit jika dibandingkan dokter pria karena dokter wanita biasanya bukan merupakan pencari nafkah utama dalam keluarganya.

Permasalahan yang berkaitan dengan dokter umum adalah belum adanya tenaga dokter umum yang berstatus sebagai pegawai tetap di RS PKU Muhammadiyah Nanggulan. Dengan belum tersedianya dokter umum tetap di RS PKU Muhammadiyah Nanggulan akan menghambat pengembangan

pelayanan seperti tidak dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Rumah sakit atau klinik milik amal usaha kesehatan Muhammadiyah yang belum melakukan kerjasama dan menginginkan kerjasama dengan BPJS, maka harus memenuhi beberapa hal. Berdasarkan Permenkes No. 71 tahun 2014, fasilitas kesehatan dapat mengadakan kerjasama dengan BPJS kesehatan melalui kerjasama perjanjian yang dilakukan antara pemimpin/ pemilik fasilitas kesehatan dengan BPJS kesehatan. Untuk dapat melakukan kerjasama maka dengan BPJS kesehatan, fasilitas kesehatan harus memenuhi persyaratan yang tertera dalam Permenkes no 71 tahun 2013.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang persepsi dan harapan dokter umum/spesialis terhadap jasa medis di RS PKU Muhammadiyah Nanggulan. Dengan mengetahui persepsi, kebutuhan dan keinginan hidup seorang dokter umum/spesialis tersebut, diharapkan dapat dijadikan landasan untuk penetapan besarnya jasa medis yang sesuai dengan harapan dokter umum/spesialis.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi dan harapan dokter umum terhadap jasa medis di RS PKU Muhammadiyah Nanggulan?

2. Bagaimana persepsi dan harapan dokter spesialis terhadap jasa medis di RS PKU Muhammadiyah Nanggulan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan persepsi dan harapan dokter umum terhadap jasa medis di RS PKU Muhammadiyah Nanggulan.
2. Mendeskripsikan persepsi dan harapan dokter spesialis terhadap jasa medis di RS PKU Muhammadiyah Nanggulan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengangkat dokter umum menjadi pegawai tetap di mana salah satu syarat agar bisa bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah adanya dokter umum/spesialis yang bersedia menjadi dokter tetap RS PKU Muhammadiyah Nanggulan.
2. Bagi pembuat kebijakan dalam menentukan jasa medis harus didasarkan pada kebutuhan dan harapan dokter umum/spesialis.

## **E. Keaslian Penelitian**

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang jasa medis bagi dokter spesialis, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Andarwati (2006) yang meneliti tentang pendekatan *emic* dalam menentukan standar jasa medis berdasarkan persepsi dan harapan dokter spesialis di RSUPA Boyolali. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi dokter spesialis empat pelayanan dasar positif terhadap jasa medis di RSUPA, meskipun kenyataannya besar insentif yang diterima belum bisa memenuhi kebutuhan dan harapan.

Penelitian selanjutnya tentang jasa medis, dilakukan oleh Herawati (2006) yang mengkaji tentang faktor-faktor berpengaruh terhadap kepuasan kerja dokter pada RSUD Kota Semarang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kejelasan jasa medis, kenyamanan tempat kerja, dan kebersihan tempat kerja merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dokter.

Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui persepsi dan harapan dokter umum/spesialis terhadap standar jasa medis di RS PKU Muhammadiyah Nanggulan. Penelitian ini lebih menekankan jasa medis dari sudut pandang dokter umum/spesialis sehingga diharapkan penelitian ini akan lebih mendapatkan hasil sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh dokter umum/spesialis.